



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKTOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan
8. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan PD yang memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II

### IKU

## Pasal 3

IKU PD merupakan acuan ukuran yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah,

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) PD dan Unit Kerja Mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh kepala PD dan unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja PD secara Keseluruhan, kepala PD melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

#### Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan IKU, Bupati menugaskan Inspektorat untuk:

- a. melaksanakan monitoring dan evakuasi akuntabilitas kinerja PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada PD di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

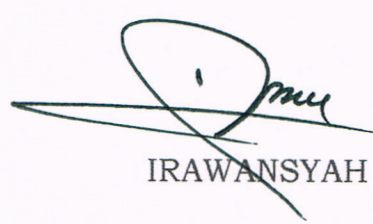
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Januari 2020  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 8 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN KUTAI TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

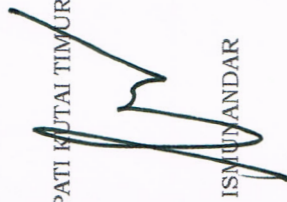
- MISI :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri
  3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata
  4. Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dan lebih baik bagi kehidupan manusia
  5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya SDM yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	Berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah s/d Oktober 2016	Disdukcapil Kab. Kutai Timur	Jumlah tempat ibadah _____ x 1000 Jumlah penduduk	Dinas Pekerjaan Umum
2	Terwujudnya Peningkatan IPM	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Pengukuran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Badan Pusat Statistik Kabupaten	$1/3 (X1+X2+X3)$	Bappeda
3	Terwujudnya daya saing melalui peningkatan jenjang pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur	Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten	Kombinasi Antara Partisipasi Sekolah, Jenjang Pendidikan Yang Sedang Dijalani, Kelas Yang Diduduki, Dan Pendidikan Yang Ditamatkan	Dinas Pendidikan
4	Terwujudnya daya saing melalui peningkatan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka Harapan Hidup Merupakan Alat untuk Mengevaluasi Kinerja Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Pada Umumnya, dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Pada Khususnya. Angka Harapan Hidup yang Rendah di Suatu Daerah Harus Diikuti Dengan Program Pembangunan Kesehatan, dan Program Sosial Lainnya Termasuk Kesehatan Lingkungan, Kecukupan Gizi dan Kalori Termasuk Program Pemberantasan Kemiskinan.	Badan Pusat Statistik Kabupaten	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
5	Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan	Persentase Penduduk Miskin	%	Mengetahui Sejahtera Mana Perkembangan Angka Kemiskinan di Daerah	Badan Pusat Statistik Kabupaten	(100- angka kemiskinan)	Bappeda
6	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	%	Karena indikator ini adalah salah satu tolak ukur dalam melihat laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk Kutai Timur	Pendataan Keluarga pada Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I _____ x 100% Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

6	Terwujudnya daya saing daerah berbasis agribisnis		%	Mengukur Rasio Jumlah Pengangguran Dengan Jumlah Angkatan Kerja	Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi) dan Data Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pengganggu terbuka usia angkatan kerja _____ x 100%  Jumlah penduduk angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
7	Terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan menuju kemandirian pangan	7	Indeks	Mengukur Kesenjangan	Kesehatan (Harapan Hidup), Pendidikan (Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah), Ekonomi (Distribusi Pendapatan)	$IPG = 1/3 (Xede(1) + Xede(2) + Inc-dis)$  $Xede = (PtXi + Pm Xm)$	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
8	Meningkatnya peran BUMD dan Industri terhadap peningkatan PAD	8	Indeks	Menjadikan Kabupaten Kutai timur Sebagai Kota Layak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Jumlah Seluruh Indikator _____ x 100%  Indikator yang Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
9	Terwujudnya daya saing lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur	9	Indeks	Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian/perkebunan	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan _____  Jumlah PDRB	Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik
10		10	Ton	Mendukung Ketersediaan Pangan di Kabupaten Kutai Timur	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota _____  100 ton	Dinas Ketahanan Pangan
11		11	%	Mengukur Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Bapenda	lain-lain PAD yang Sah - lain-lain PAD yang Sah - 1 _____ x 100%  lain-lain PAD yang Sah - 1	Bapenda
12		12	%	Mengukur kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri _____ x 100%  Jumlah PDRB	Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik
13		13	Indeks	Untuk mengukur tingkat pembangunan dan perkembangan status desa	Bappeda	$IPD = (b_1xV_1 + b_2xV_2 + b_3xV_3 + b_4xV_4) \times 20$	Bappeda
14		14	%	Proporsi Jalan Kondisi Mantap	Bidang Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum)	Panjang jalan kondisi baik _____  Jumlah panjang jalan	Dinas Pekerjaan Umum
15		15	%	Mempertahankan dan Menjaga Tingkat Kemandirian dan Pelayanan Kondisi Permukaan Jalan			

10	Terwujudnya daya saing lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien	16	Ketaatan terhadap RTRW	%	Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Yang Sudah di Tetapkan	RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035	Realisasi RTRW Rencana Peruntukan  _____ x 100%	Dinas Perencanaan & Penataan Ruang
11	Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional	17	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	Indikator ini Merupakan Salah Satu Tolak Ukur Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Profesional	Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal _____ x 100%  Jumlah total ASN	Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	18	Opini BPK	Predikat	WTP (Penilaian Yang Diberikan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD)	BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Inspektorat Wilayah
13	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	19	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Indeks	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menerapkan pelayanan publik yang baik	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur _____ x Nilai Penimbang  Total Unsur Yang Terisi	Bagian Organisasi & Tata Laksana
		20	Terintegrasinya Aplikasi Pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik Elektronik Yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Daerah	Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik	Jumlah Aplikasi Layanan Publik Yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi & Informatika, Persandian & Statistik

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR